

**PERANCANGAN ANIMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)
STUDI KASUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tugas Akhir



PERANCANGAN

Oleh :

RR. DESANTI ARUMINGTYAS D.

NIM : 1011965024

**PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
JURUSAN DISAIN
FAKULTAS SENI RUPA
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) YOGYAKARTA
2015**

**PERANCANGAN ANIMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)
STUDI KASUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Tugas Akhir



PERANCANGAN

Oleh :

RR. DESANTI ARUMINGTYAS D.

NIM : 1011965024

**Tugas Akhir Ini Diajukan Kepada
Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Bidang Desain Komunikasi Visual**



KATA MUTIARA

Jadilah pensil yang bisa menuliskan cerita bahagia, dan jadilah penghapus yang bisa menghilangkan kisah sedih.

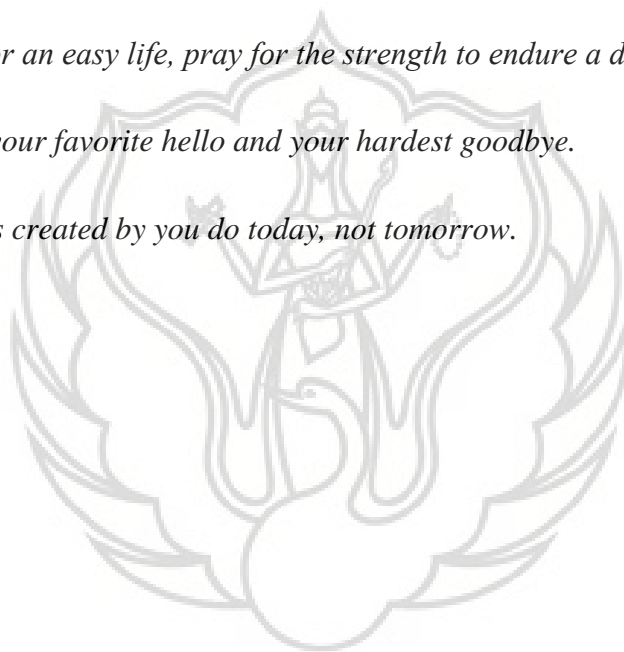
Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci untuk sukses. Jika Anda mencintai yang Anda kerjakan, Anda akan sukses. - Albert Schweitzer

Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya.

Don't pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.

Your future is created by you do today, not tomorrow.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan kepada saya sehingga saya diberi kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul PERANCANGAN ANIMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) STUDI KASUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Selain itu dalam proses perancangan hingga terselesaikannya tugas akhir ini saya banyak menerima bantuan dan dorongan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan penuh hormat dan kerendahan hati saya hendak ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Agus Burhan.,M.Hum selaku Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Suastiwi., M.Des selaku Dekan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak M. Sholahuddin, S.Sn.,MT selaku Ketua Jurusan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Hartono Karnadi.,M.Sn selaku Ketua Program Studi DKV Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Baskoro Suryo B.,M.Sn selaku Pembimbing I.
6. Bapak Drs. Arief Agung S.,M.Sn selaku Pembimbing II.
7. Bapak M. Faisal Rochman, S.Sn.,MT selaku Penguji Ahli / *Cognate*.
8. Seluruh *staff* dosen DKV Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
9. Kedua orang tua saya Alm. RM. Sutadi Rakantha dan Ibu Sajekti, yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang terus dipanjatkan untuk saya.
10. Om Indrayanto yang telah mengasihi saya, membantu dana dan merawat saya hingga saya bisa menyelesaikan sekolah saya hingga menjadi sarjana.
11. Adik laki-laki saya R. Febria Yudhabayu Narendra yang selalu memberikan saya nasehat dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Kekasih, sahabat, musuh, kakak, *partner* saya Ardi Alvianto Prihandoyo yang telah banyak membantu terutama dalam hal suntikan dana, pinjaman wifi, motivasi, kecerewetan, kegembiraan, kebersamaan sehingga memacu semangat saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Keluarga, tetangga, teman sekolah yang selalu menanyakan kapan lulus dan menikah sehingga memicu saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Teman-teman angkatan 2010, Rani Permatasari, Priscillia Panti Meyrina, Adilla Dewi, Fitriana Santi, Salomo Haryo, dan Aida Rahma terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaannya, semoga 4 tahun ini bisa terjalin untuk selamanya.
15. Seluruh dosen dan staf DKV ISI Yogyakarta, serta seluruh pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua dengan nikmat lain yang lebih besar, Amin.

Dalam penyusunan tugas akhir ini saya menyadari masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu sekiranya saya senantiasa bersedia dan berharap untuk saran dan kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan hasil karya tugas akhir ini.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih serta besar harapan hasil karya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rr. Desanti Arumingtyas Dyanningrat
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 17 Desember 1991
NIM : 1011965024
Jurusan / Prodi : Desain / Desain Komunikasi Visual

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang berjudul :

**“PERANCANGAN ANIMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) STUDI KASUS PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Ditujukan sebagai tugas akhir untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Seni pada Program Studi Desain Komunikasi Visual, Jurusan Desain Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karya animasi tugas akhir ini merupakan hasil dari perancangan saya mulai dari analisis, ide cerita, hingga proses penciptaan sampai terselesaikannya animasi tersebut. Sejauh yang saya ketahui, karya tugas akhir saya ini bukan merupakan duplikasi atau tiruan dari skripsi atau tugas akhir yang sudah dipublikasikan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 5 Januari 2015

Rr. Desanti Arumingtyas D.
NIM 1011965024

ABSTRAK

PERANCANGAN ANIMASI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) STUDI KASUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Hal itu dikarenakan untuk memajukan mutu pelayanan dan memberikan kepuasan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, budaya birokrasi di Indonesia yang telah berubah mengakibatkan beberapa masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut akan menghalangi terciptanya pemerintahan di Indonesia yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut dikenal masyarakat dengan nama maladministrasi.

Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan maladministrasi, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Siapun yang merasa dirugikan atas pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara dapat melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia yang ada di setiap daerahnya. Namun, tidak setiap orang mengenal dan memahami tentang Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perancangan media komunikasi untuk mengenalkan Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga fungsi Ombudsman Republik Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : perancangan, animasi, maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRACT

ANIMATION DESIGN AS A COMMUNICATION MEDIA FOR OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (ORI STUDY CASE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION

It is proper that a good private institution, individual, or government provides a good public service to the community. It was due to advancing the quality of service and satisfaction, justice, and social welfare. However, bureaucratic culture in Indonesia, which has changed resulting in some communities prefer a shortcut to perform an unlawful act. This will preclude the creation of an effective, efficient, honest, open, clean, and free from corruption, collusion, and nepotism of Indonesian government. Violations against the law known to the public under the name of maladministration.

The task of Ombudsman of the Republic of Indonesia is oversee the implementation of public service, receive reports, investigate and resolve issues relating to the maladministration, as written in the Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Everyone who find it been disadvantaged by the provision of public services by state officials, can submit report to the Ombudsman of the Republic of Indonesia in each region. However, not everyone knows and understands about the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Therefore it is necessary to design the communications media to introduce the Ombudsman of the Republic of Indonesia to the community, especially the Special Region of Yogyakarta so that the function of the Ombudsman of the Republic of Indonesia can be done well.

Keywords: *design, animation, maladministration, the Ombudsman of the Republic of Indonesia*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA MUTIARA	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Perancangan	8
D. Batas Lingkup Perancangan	8
E. Manfaat Perancangan	9
F. Metode Perancangan	10
G. Skematika Perancangan	12

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Identifikasi dan Analisis Data	13
1. Ombudsman Republik Indonesia	13
2. Falsafah Ombudsman Republik Indonesia	16
3. Visi dan Misi	17
4. Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman Republik Indonesia	18
5. Laporan atau Pengaduan Masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Januari – Desember Tahun 2013	19
6. Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan	22
7. Contoh Kasus yang telah diselesaikan Ombudsman Republik Indonesia	23
B. Tinjauan Pustaka	28
C. Landasan Teori	29
1. Animasi	29
a. Pengertian Animasi	29
b. Prinsip Animasi	30
c. Jenis-jenis Animasi	37
d. Teknik-teknik Animasi	41
2. Multimedia	43
3. Desain Komunikasi Visual	44
a. Desain Komunikasi Visual	44
b. Warna	46
c. Storyboard	47
4. Software yang Digunakan	48
D. Metode Analisis Data	51
E. Kesimpulan Analisis	54

BAB III. KONSEP PERANCANGAN

A. Pra Produksi	55
1. Tujuan Komunikasi	55
2. Strategi Komunikasi	55
3. Tujuan Kreatif	56
4. Strategi Kreatif	56
5. Konsep Kreatif	57
a. Cerita	57
1) Judul	57
2) Sinopsis	57
3) Script	58
4) Storyline	65
b. Visual	74
c. Karakter	77
d. Typografi	79
e. Cover	79
6. Format	79
B. Produksi	80
1. Modeling dan Texturing	80
2. Rigging	80
3. Skinning	80
4. Animation	80
5. Rendering	80
C. Pasca Produksi	81
1. Dubbing	81
2. Final Compose.....	81
3. Mastering	81

BAB IV. VISUALISASI DESAIN

A. Layout	82
1. Typografi	82
2. Warna	82
3. Karakter	83
4. Cover	88
5. Poster	90
B. Storyboard	91
C. Final Artwork	115

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.0 Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta.....	15
Gambar 2.1 Papan Nama Kantor Ombudsman Republik Indonesia	16
Gambar 2.2 Squash and Stetch	31
Gambar 2.3 Antisipasi	31
Gambar 2.4 Staging	32
Gambar 2.5 Straight-ahead action	32
Gambar 2.6 Pose-to-pose	33
Gambar 2.7 Follow-thorough dan Overlapping Action	33
Gambar 2.8 Slow In dan Slow Out	34
Gambar 2.9 Arcs	34
Gambar 2.10 Timing	35
Gambar 2.11 Exaggeration	35
Gambar 2.12 Solid Drawing	36
Gambar 2.13 Character Personality	37
Gambar 2.14 Contoh Animasi 2D (1)	37
Gambar 2.15 Contoh Animasi 2D (2)	38
Gambar 2.16 Contoh Animasi 3D (1)	39
Gambar 2.17 Contoh Animasi 3D (2)	39
Gambar 2.18 Contoh Animasi Stop Motion (1)	40
Gambar 2.19 Contoh Animasi Stop Motion (2)	40
Gambar 2.20 Logo Blender 3D	48
Gambar 2.21 Contoh Blender 3D	49

Gambar 2.22 Adobe Premiere CS 6	50
Gambar 2.23 Adobe Photoshop CS 6	51
Gambar 3.0 Visual Orang Kantoran	74
Gambar 3.1 Visual Anak Remaja	74
Gambar 3.2 Visual Ayah/Orang Tua	75
Gambar 3.3 Visual Ibu/Orang Tua	76
Gambar 3.4 Visual Petugas	76
Gambar 4.1 Alternatif Typografi	82
Gambar 4.2 Alternatif Warna	83
Gambar 4.3 Sket Alternatif Karakter Om Buds	83
Gambar 4.4 Sket Karakter Om Buds	84
Gambar 4.5 Karakter Om Buds 3D	84
Gambar 4.6 Sket Alternatif Karakter Sheila	84
Gambar 4.7 Sket Karakter Sheila	85
Gambar 4.8 Karakter Sheila 3D	85
Gambar 4.9 Sket Alternatif Karakter Pak Robin	85
Gambar 4.10 Sket Karakter Pak Robin	86
Gambar 4.11 Karakter Pak Robin 3D	86
Gambar 4.12 Sket Alternatif Karakter Bu Siti	86
Gambar 4.13 Sket Karakter Bu Siti	87
Gambar 4.10 Karakter Bu Siti 3D	87
Gambar 4.11 Sket Karakter Petugas	87
Gambar 4.12 Karakter Petugas 3D	88
Gambar 4.13 Alternatif Cover Judul	89

Gambar 4.14 Cover Closing	89
Gambar 4.15 Poster Animasi	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Substansi Laporan	2
Tabel 2.0 Pelapor	19
Tabel 2.1 Instansi Pelapor	20
Tabel 2.2 Substansi Laporan	20
Tabel 2.3 Mekanisme Laporan	21
Tabel 2.4 Tanggapan Pelapor	21



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.0 Alur Penyelesaian Laporan/Pengaduan	22
Bagan 3.0 Pesan Utama	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah sepatutnya sebuah lembaga baik swasta, perseorangan, ataupun pemerintah memberikan sebuah pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Hal itu dikarenakan untuk memajukan mutu pelayanan dan memberikan kepuasan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, budaya birokrasi di Indonesia yang telah berubah mengakibatkan beberapa masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut akan menghalangi terciptanya pemerintahan di Indonesia yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut dikenal masyarakat dengan nama maladministrasi (baca : mal-administrasi). Menurut Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (Nurtjahjo, 2013 : 4). Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-

lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut (Nurtjahjo, 2013 : 4).

Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan maladministrasi, sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

	SUBSTANSI	JUMLAH
1.	Penundaan berlarut	98
2.	Penyalahgunaan wewenang	26
3.	Berpihak	32
4.	Tidak memberikan pelayanan	25
5.	Penyimpangan prosedur	91
6.	Permintaan uang, barang dan jasa	17
7.	Tidak kompeten	-
8.	Tidak patut	14
9.	Diskriminasi	19
10.	Konflik kepentingan	-
	JUMLAH	322

*Tabel 1.0 Substansi Laporan
(Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Daerah Perwakilan Yogyakarta.
Laporan Tahun 2013)*

Dari data diatas, dapat dilihat penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur adalah kasus yang paling tinggi terjadi dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya. Adapun salah satu kasus

yang pernah ditangani dan dapat terselesaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yakni kasus penundaan berlarut : Penundaan Berlarut atas proses Perbaikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. XXXXX/PDT/2008 yang sudah memakan Waktu 22 (dua puluh dua bulan (hampir 2 tahun) Sejak Diputus (Nurtjahjo, 2013 : 22-24).

Laporan : Pelapor sebagai Pemohon Kasasi mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. Y/S-BLT/SBY/II/2012 tanggal 3 Februari 2012, berisi pertanyaan kepastian pengiriman Perbaikan Putusan Kasasi MA No. XXXXX/ PDT/2008. Sebab Pelapor menerima surat dari Pengadilan Negeri A dengan No. Surat WXX-U13/806/Pdt.01.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011, berisi penyampaian adanya kesalahan penulisan dalam putusan No. XXXXX/PDT/2008 yang harus diperbaiki. Mengingat salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kasasi No. XXXXX/PDT/2008 tanggal 14 Juli 2010 sampai saat ini sudah memakan waktu 22 (dua puluh dua bulan) sejak diputus, belum diterima perbaikannya oleh Pelapor. Pelapor telah mempertanyakan *Standard Operational Procedure* (SOP) jangka waktu putusan harus diterima oleh Pengadilan, karena ini menimbulkan kerugian bagi Pelapor dan kemungkinan pungutan liar oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Tindakan lanjut Ombudsman Republik Indonesia : Ombudsman meminta penjelasan/klarifikasi pertama kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 31 Mei 2012 melalui surat No. 0XXX/KLA/0601-2011/IT- 02/Tim.2/V/2011, intinya menanyakan berlarut-larut proses perbaikan salinan putusan perkara perdata sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. XXXXX/PDT/2008 yang telah diputuskan pada tanggal 14 Juli 2010 yang sampai saat ini belum diperbaiki dan dikirim kepada Pengadilan Negeri A. Surat permintaan penjelasan/klarifikasi kedua dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2012, dengan No. 0XXX/KLA/0601-2011/IT-02/Tim.2/ VII/2011.

Respons/Implementasi : Laporan ini berhasil diselesaikan Ombudsman Republik Indonesia dengan adanya keterangan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertemuan dengan Tim Ombudsman Republik Indonesia bertempat di Kantor Panitera Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2012. Panitera Mahkamah Agung menjawab bahwa putusan tersebut dalam proses *renvoi* dan Mahkamah Agung sudah mengirimkan surat kepada Pelapor tanggal 21 Mei 2012 dengan Nomor:XXXX/PAN.2/241/P/2011/SK/Perd yang berisi berdasarkan surat Pelapor tertanggal 16 Mei 2011 No. 0XXX/V/2011, putusan kasasi dimaksud masih dalam proses *minutasi*.

Siapapun yang merasa dirugikan atas pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara dapat melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia yang ada di setiap daerahnya. Tidak sulit melaporkan dugaan praktik pelanggaran terhadap pelayanan publik ke Ombudsman Republik Indonesia. Langkah pelaporan dan penyelesaiannya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (Suara Ombudsman, 2013 : 33):

1. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui surat, faksimile, telepon, pengaduan online melalui website Ombudsman Republik Indonesia atau datang langsung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia. Pengaduan yang akan ditindaklanjuti adalah yang mencantumkan:

Nama lengkap :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat lengkap :

Status perkawinan :

Status pekerjaan :

Uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci.

2. Laporan masyarakat kemudian diregistrasi dan diserahkan kepada bagian persuratan untuk pemberian nomor laporan, tanggal *register* laporan dan pencatatan ke dalam *database*. Laporan yang telah

masuk *database* langsung diserahkan kepada anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk dilakukan seleksi secara substansi.

3. Kemudian, laporan masyarakat tersebut diserahkan kepada asisten Ombudsman Republik Indonesia Bidang Penyelesaian Laporan untuk diteliti dan ditindaklanjuti. Para asisten Ombudsman Republik Indonesia yang telah masuk dalam beberapa tim akan melakukan analisis terhadap berkas laporan masyarakat guna memastikan bahwa laporan tersebut menjadi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dan memenuhi kelengkapan data yang diperlukan.
4. Bilamana data dinyatakan lengkap dan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia, maka tahap selanjutnya adalah mengambil beberapa langkah penyelesaian laporan. Berikut ini sejumlah langkah yang dapat ditempuh Ombudsman Republik Indonesia:
 - a. Permintaan Klarifikasi Tertulis
 - b. Investigasi Lapangan
 - c. Pemanggilan
 - d. Mediasi/Konsiliasi
 - e. Ajudikasi Khusus
5. Produk penyelesaian laporan yang ditempuh melalui proses Permintaan Klarifikasi Tertulis, Investigasi Lapangan dan Pemanggilan adalah Rekomendasi/Saran Ombudsman. Sementara produk yang dihasilkan dari proses Mediasi/ Konsiliasi dan Ajudikasi Khusus masing-masing adalah Kesepakatan dan Putusan.

Selain melalui penerimaan laporan masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia melalui inisiatif sendiri juga dapat melaksanakan *systemic review* terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang patut diduga terjadi maladministrasi yang bersumber dari berita, informasi, keluhan,

dan saran yang disampaikan oleh masyarakat melalui media massa. Pelaksanaan *systemic review* ini didasari pada kondisi pelayanan publik yang buruk yang diterima masyarakat umum secara luas.

Kantor pusat Ombudsman Republik Indonesia terletak di Jakarta, sedangkan kantor perwakilannya tersebar di beberapa daerah di Indonesia, yakni Medan, Batam, Pekanbaru, Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Makasar, Manado, NTT, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura. Pada perancangan ini, klien adalah Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jl. Wolter Mongonsidi No. 20, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik keberadaannya tentu masih belum banyak diketahui oleh masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak atas layanan dan penyelenggara pelayanan yang mempunyai kewajiban memberikan layanan. Hal ini disebabkan karena kehadiran Ombudsman Republik Indonesia yang relatif ibarat bayi yang baru hadir dan publikasi pun belum dilakukan secara massif (Widagdo, 2013 : 4).

Peran Ombudsman Republik Indonesia memang masih belum diketahui oleh masyarakat kebanyakan dan masih dianggap asing oleh orang-orang awam. Secara nasional, Ombudsman Republik Indonesia masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat, dan selama ini juga belum ada tindakan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, hanya saja telah terbantu oleh media massa yang meliput Ombudsman Republik Indonesia pada waktu ada kasus yang sedang ditangani. Pada awal tahun 2013, kantor pusat telah memproduksi majalah “Suara Ombudsman” yang berisikan tentang kiprah dan jejak Ombudsman, tapak tilas perjalanan Ombudsman, catatan maladministrasi, dan lain-lain. Namun hal ini juga belum membantu maksimal untuk lebih memperkenalkan Ombudsman

Republik Indonesia, karena penyebaran majalah ini dirasa kurang begitu tepat. Penyebaran majalah hanya dilakukan di kantor pusat dan beberapa instansi pemerintah, dan tidak menyebar ke kantor-kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan kalangan masyarakat.

Kalau masyarakat sudah percaya, sesederhana apapun kontribusi Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya besar meningkatkan kualitas pelayanan publik akan jauh lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi dalam situasi masyarakat yang masih rentan kekecewaan dalam mendapatkan pelayanan (Hasymi, 2013 : 5).

Harapan dan keinginan klien adalah Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Mengingat publikasi dan sosialisai tentang Ombudsman Republik Indonesia pernah dilakukan melalui majalah, surat kabar belum memberi dampak yang kuat atas keberadaan Ombudsman Republik Indonesia khususnya di Yogyakarta. Melalui perancangan media komunikasi dan sosialisasi kali ini akan dilakukan dengan cara yang berbeda yakni dengan animasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, karena cerita yang diambil adalah mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat tentang pengaduan pelayanan publik. Media ini dipilih karena media-media yang ada atau sebelumnya dirasa belum terlalu mendukung dalam menjangkau lapisan masyarakat.

B. Rumusan masalah

Bagaimana merancang animasi yang baik secara visual dan komunikatif sebagai media komunikasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Perancangan

1. Sebagai media komunikasi untuk lebih memperkenalkan Ombudsman Republik Indonesia kepada kalangan masyarakat khususnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pendekatan cerita-cerita permasalahan masyarakat tentang maladministrasi yang pernah ditangani Ombudsman Republik Indonesia.
2. Menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan cara visual dan komunikatif sehingga pesan lebih mudah untuk tersampaikan.
3. Membantu mengatasi permasalahan Ombudsman Republik Indonesia khususnya perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mensosialisasikan Ombudsman Republik Indonesia sehingga tujuan untuk membentuk pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diwujudkan.

D. Batas Lingkup Perancangan

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka perlu memberi batasan masalah atau batas lingkup secara jelas dan terfokus.

1. *Target audience* adalah masyarakat sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami / mengetahui adanya maladministrasi yang dilakukan oleh pelayanan publik.
2. Masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada bagaimana cara membuat animasi sebagai media komunikasi Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat dengan pendekatan cerita dari contoh kasus yang pernah ditanganinya.
3. Dalam perancangan ini hanya membahas dan mengerjakan bentuk output animasi sebagai media komunikasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal-hal teknis

selain segmen tersebut seperti *budget* dan pengumpulan dana tidak dibahas.

E. Manfaat Perancangan

1. Bagi Lembaga

- a. Sebagai media komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih dikenal masyarakat, khususnya daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kontribusi Ombudsman Republik Indonesia terhadap tugas dapat lebih maksimal.
- b. Mewujudkan tujuan Ombudsman Republik Indonesia untuk menciptakan pemerintahan di Indonesia yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja contoh kasus yang berhubungan dengan pelayanan publik, dan mengetahui kontribusi Ombudsman Republik Indonesia dalam membantu mengatasi masalah pelayanan publik yakni dalam bidang maladministrasi
- b. Membantu memecahkan solusi dalam hal merancang media komunikasi Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat.
- c. Mengoptimalkan ilmu yang telah didapat dan pelajari selama kuliah, sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

3. Bagi Masyarakat

- a. Memahami beberapa contoh maladministrasi khususnya dibidang pelayanan publik.
- b. Membantu masyarakat yang mengalami masalah pelayanan

publik agar dapat langsung menghubungi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera ditindaklanjuti.

F. Metode Perancangan

1. Data yang diperlukan

- a. Data visual dan verbal yang berhubungan dengan Ombudsman Republik Indonesia dari latar belakang, tujuan, visi-misi, logo, alur penyampaian pengaduan, dan lain-lain.
- b. Data mengenai laporan/pengaduan masyarakat berdasarkan klasifikasi pelapor, instansi terlapor, substansi laporan, dan mekanisme laporan bulan Januari – Desember tahun 2013.

2. Metode pengumpulan data

a. Studi Literatur

Mengumpulkan data verbal dan visual tentang Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung perancangan animasi. Kajian pustaka dari beberapa buku teori ilustrasi, animasi, ensiklopedi, buku saku Ombudsman dan majalah Ombudsman.

b. Pertautan

Data verbal dan visual yang mendukung perancangan ini juga dapat diperoleh dari beberapa website di internet.

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan, yakni pihak Ombudman Republik Indonesia baik dari staff maupun anggota atau pengurusnya dan masyarakat daerah Yogyakarta.

3. Instrumen/Alat Pengumpulan Data

a. Laptop dan Flashdisk

Flashdisk akan digunakan untuk meng-*copy* data/file tentang kasus maladministrasi yang dibutuhkan dari kantor Ombudsman Republik Indonesia dan dipergunakan untuk mengumpulkan data-data untuk dipergunakan sesuai kebutuhan. Kemudian laptop akan digunakan untuk menyimpan semua data-data untuk dipergunakan ke tahap proses perancangan.

b. Handphone

Handphone digunakan untuk merekam saat wawancara dengan narasumber. Alat perekam yang ada di *handphone* dapat digunakan untuk membantu mengumpulkan data dan fakta tentang kasus maladministrasi dan data tentang Ombudsman Republik Indonesia.

c. Kamera

Kamera akan digunakan untuk mengambil dan mengabadikan gambar atau kejadian saat wawancara atau pada saat mencari data/berita yang dibutuhkan untuk membantu proses pengerjaan. Gambar yang diambil dari kamera sendiri adalah sebagai bukti bahwa data gambar perancangan ini adalah benar-benar diperoleh dengan sendiri dan tidak mengambil milik orang lain tanpa ijin.

G. Skematika Perancangan

